



Judul : DPR RI Tersandera - Novanto Masih Berkuasa
Tanggal : Rabu, 22 November 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

DPR RI Tersandera

Novanto Masih Berkuasa

JAKARTA, KOMPAS — Meski berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Setya Novanto masih punya kekuasaan dan pengaruh yang kuat di DPR serta Partai Golkar. Kondisi ini membuat institusi DPR tersandera dan citra Partai Golkar terancam makin terpuruk.

Kuatnya pengaruh Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, yang kini juga menjadi tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ini terlihat dari dinamika di Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) dan rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11).

Kemarin, MKD batal menggelar rapat konsultasi dengan semua unsur pimpinan fraksi untuk membahas penahanan Novanto. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat batal digelar karena tidak semua pemimpin fraksi bisa hadir.

Sementara itu, rapat pleno DPP Partai Golkar yang berlangsung sekitar delapan jam memutuskan Novanto tetap sebagai Ketua DPR. Sementara Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar. Posisi ini berlaku hingga ada putusan praperadilan yang dimohon Novanto terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Sidang praperadilan perkara itu menurut rencana dimulai 30 November ini.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, jika

Novanto, Golkar, dan Publik

HAL 4

Novanto menang praperadilan, jabatan Idrus sebagai plt ketua umum berakhir. Namun, jika Novanto kalah, Golkar akan meminta Novanto mengundurkan diri sebagai ketua umum dan Ketua DPR. "Jika Pak Novanto tidak mau mengundurkan diri, pleno memutuskan akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa untuk mencari ketum baru," ujarnya.

Apa yang terjadi di MKD dan rapat pleno Partai Golkar ini mirip dengan yang dimohon Novanto dalam dua surat, yang kemarin masing-masing bermeterai Rp 6.000 dan ditujukan kepada DPP Partai Golkar dan Pimpinan DPR.

Kepada DPP Partai Golkar, lewat suratnya, Novanto menyatakan, tidak ada pemberhentian terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga menunjuk Idrus menjadi plt ketua umum.

Sementara lewat surat kepada

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

DPR RI Tersandera

(Sambungan dari halaman 1)

pimpinan DPR, Novanto, antara lain, meminta tidak ada rapat pleno atau sidang MKD terkait kemungkinan memberhentikan dirinya sebagai ketua ataupun anggota DPR.

Isi kedua surat itu berbeda dengan pernyataan Idrus sebelumnya. Menurut Idrus, di hari-hari menjelang ditahan KPK, Novanto sudah mengikhlaskan jabatannya di partai dan DPR. "Dia sampaikan tidak akan melakukan sesuatu yang menghambat mekanisme di Golkar ataupun di DPR. Diikhlaskan," kata Idrus (*Kompas*, 21/11).

Momentum MKD

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, surat dari Novanto kepada pimpinan DPR merupakan upaya untuk menyandera DPR, khususnya MKD. Dia berharap MKD tidak terpengaruh atau tersandera oleh surat Novanto. Citra DPR akan tercemar dan kinerjanya terancam terganggu jika sampai tersandera surat Novanto. "Ini momentum bagi MKD untuk menunjukkan dirinya sebagai penjaga kehormatan DPR," katanya.

Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan, dengan adanya surat dari Novanto dan keputusan DPP Partai Golkar, pimpinan DPR akan menunda penggantian Ketua DPR sampai proses hukum Novanto rampung di tahap praperadilan.

MKD, ujarnya, juga tidak akan memproses dugaan pelanggaran kode etik Novanto. MKD baru akan memproses apabila Novanto sudah berstatus sebagai terdakwa. "Karena Pak Novanto

masih Ketua Umum Golkar yang sah, sesuai UU MD3 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) tidak akan ada pergantian kepemimpinan di DPR," kata Fahri.

Pasal 87 UU MD3 menyebutkan, pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politiknya. Terkait hal itu, penggantian Novanto dari posisi Ketua DPR oleh Golkar, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Johnny G Plate, lebih cepat dan elegan daripada oleh MKD.

"Golkar seharusnya sadar sepenuhnya dan menggunakan kewenangannya seperti diatur dalam UU MD3 untuk segera mengganti Novanto demi menjaga kehormatan DPR," kata Johnny.

Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto, pun mendesak Golkar melihat lebih obyektif. Setelah ditahan, Novanto tidak mungkin menjalankan tugas sebagai Ketua DPR. Ditambah lagi citra DPR ikut menjadi buruk.

Nurdin mengatakan, dirinya, Idrus, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan sejumlah ketua koordinator bidang di Partai Golkar dalam waktu dekat akan menemui Novanto. Mereka ingin meminta Novanto untuk mengundurkan diri secara legawa. "Supaya beliau tidak usah dimundurkan. Ini demi penghargaan kemanusiaan," ujarnya.

Manuver

Meski Novanto masih dinyatakan sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada manuver di internal Golkar untuk bersiap-siap jika Novanto lepas dari dua jabatan itu.

Beberapa nama disebut-sebut berpotensi menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR. Mereka, antara lain, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumilang Kartasasmita, dan Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Kahar Muzakir.

Kemarin, Bambang Soesatyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka pertemuan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri. Bambang menampik bahwa pertemuan itu membicarakan perihal kursi Ketua DPR.

Kahar Muzakir mengatakan tidak ingin mengisi posisi Ketua DPR. "Kalau (Bambang Soesatyo) sudah dipanggil Presiden, barangkali dia yang jadi (Ketua DPR)," kata Kahar.

Sementara itu, Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar jika hal itu merupakan aspirasi kader dan pengurus. Ia pun mempersilakan pengurus daerah dan pusat untuk berkonsolidasi. "Kalau teman-teman memberi dukungan itu, sebagai kader, saya siap," katanya.

(AGE/DD12/SAN/
APA/IAN/WAD/KOR/NTA)



Lihat Video Terkait
"Golkar Gelar Rapat Pleno
Bahas Nasib Setnov"
di Kompas.id



Suarakan komentar Anda
mengenai artikel ini dan
baca di Kompas.id